

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH
(Studi di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum

Disusun Oleh :

JUNAITI

NPM : 1521020278

Program Studi : Siyasah Syar'iyah



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH
(Studi di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah. M.A

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dengan demikian dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data yang diambil sebagai rujukan, selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang pembahasan. Analisis dilakukan dengan cara analisis kualitatif, melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan pembangunan desa belum sepenuhnya terlaksana karena anggaran pembangunan desa yang terbatas. Pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam yakni seorang pemimpin harus berprinsip bahwa kekuasaan amanah dan adil.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif
Hukum positif dan Fiqih siyasah**

Nama : Junaiti

NPM : 1521020278

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

NIP. 197002022000032001

Drs. Henry Iwansyah, M.A

NIP. 1958120719890310003

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi di
Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung
Utara)**, Disusun oleh: **JUNAITI, NPM: 1521020278, Fakultas: Syari'ah,
Jurusan: Siyasaah Syar'iiyyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah pada hari/tanggal: Selasa, 30 April 2019.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.HI. 

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. 

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. 

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. 



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
(النساء ٥٨)

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58)”¹



¹ Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah, *Al-Quran Transliterasi Latin Terjemah Indonesia* (Jakarta:PT Suara Agung),h.164.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada Orang- Orang yang Tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Ayahku (Namsir. alm) dan Ibuku tercinta (Murnah) yang telah mendidik dan membesarkanku sejak balita hingga dewasa, terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang Ibu berikan, dengan Do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah selalu memberikan nikmat- Nya kepada Ayah dan ibu.
2. Untuk kakak-kakak kandungku Nasih alm, Syaipul Hadi, Asri, Mistiah, Ratih, Cecep Qosasih, Ratih, Marina Az-Zakiyah Hafizoh dan Junainah. Yang selalu menjadi motivasi ku, memberi semangat, Do'a yang selalu diberikan kepada ku, yang membantu materil maupun formil serta masukan sehingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita.
3. Untuk kakak iparku Fitri, Atma Jaya, M. Alghojali, Hariyanto, Septi, Yansi Irawan Mpd. Yang selalu memberikan semangat, motivasi dan membantu baik secara materi maupun formil.
4. Untuk keponakanku tersayang Maulana Ma'ruf seorang Hafiz qur'an, Eli Pratama, Isfa Lina Maysoro, Amar Ma'ruf, Fajar Hadi, Nur Jannah, An-Nur Yasmin al-ghojali, Febryani, Alia Nur Fatimah, Alif Putra alghojali dan M. Daffa Qosasih.
5. Yang kubanggakan Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Junaiti dilahirkan di Padasuka, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 20 Juli 1996. Anak ke sembilan dari sembilan bersaudara. Dari buah cinta kasih pasangan Bapak Namsir dan Ibu Murnah. Adapun jenjang pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2009.
2. Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) Pondok Pesantren Minhajul Huda, Serbayaman Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2012
3. Madrasah Aliyyah (MA) Al-Huda, Serbayaman Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2015
4. Pada tahun yang sama 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung program Strata 1 (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah Nya serta petunjuk dan limpahan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : Analisis pelaksanaan pembangunan desa dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (Studi di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufik nya dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak. Dalam proses penyelesaiannya, tidak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

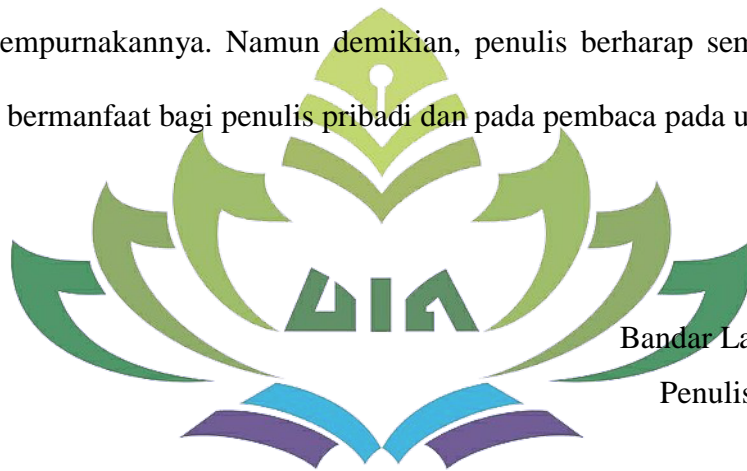
1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Drs.Susiadi AS, M.Sos.I., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selaku ketua jurusan siyasah yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.
4. Dr. Hj.Erina Pane, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan penguji II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan support serta meluangkan waktunya demi terselesainya skripsi ini.
5. Drs. Henry Iwansyah.M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Risky selaku kepala Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara
8. Qoriansyah, selaku sekretaris Desa Cempaka Raja Kecamatan sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara
9. Petugas perpustakaan Fakultas Syariah dan Petugas Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- 10.Keluarga besar bapak Namsir dan Ibu Murnah, yang selalu mendo'akan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 11.Sahabat-sahabat Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

12. Untuk sahabat-sahabat ku Nurhalima, Siska Novalia, Desti Nurtiasih, Siti Asyiatun, Arisusanti, Murtiana, dan teman-teman satu kelas khususnya kelas A. Teman-teman KKN, dan Teman-teman Kelompok PPS Akselarasi.

13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pada pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 2019

Penulis

Junaiti
1521020278

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 10 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| F. Metode penelitian | 12 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pembangunan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 | |
| 1. Pengertian tentang Pembangunan Desa | 16 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat dalam Pembangunan Desa | 16 |
| 3. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan | 19 |
| A. Pembangunan Desa dalam Fiqih Siyasah tentang Peran dan Tanggung Jawab pemimpin | |
| 1. Prinsip-prinsip Siyasah tentang Pemerintahan | 22 |
| 2. Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin | 33 |

BAB III HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Desa..... | 43 |
| B. Keadaan Geografis dan Demografis..... | 44 |
| C. Pemerintahan Desa Cempaka Raja..... | 48 |
| D. Kebijakan kepala Desa dalam Pembangunan | 51 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cempaka Raja, sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..... | 56 |
| B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 67 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini membutuhkan definisi untuk memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan fiqih Siyash (Studi di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)”**. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

“Analisis adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.”¹

2. Pelaksanaan

“Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, penerapan, keputusan).”²

3. Pembangunan

Pembangunan adalah proses yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, Infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi kelembagaan dan budaya.

¹Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h.119.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.774.

4. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴

6. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara, sedangkan hukum positif menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁵ Hukum positif dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶ Agar kehidupan masyarakat menjadi aman.

³ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)h.2.

⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Cet-1, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012),h.349.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987),h.73

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.3-4.

Jadi dengan demikian, maksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang praktek pelaksanaan pembangunan Desa dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fiqih Siyasah praktek tersebut adalah sebagaimana yang ada di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah

1. Alasan Objektif

Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷ Pelaksanaan Pembangunan terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam arti sering terjadi kesalahan dan penyelewangan.

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pembangunan Desa.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.

⁷Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, h.45.

C. Latar Belakang Masalah

Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara Indonesia, desa merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (1), desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁸ Pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani.⁹ Adapun pada pengelolaan jaringan irigasi, di Desa Cempaka belum tersedianya jaringan irigasi, padahal sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa

⁸ Zuhraini, *Hukum Pemerinthan Desa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h.16.

⁹ Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait* (Jakarta: Visimedia, 2015), h.3.

Cempaka untuk kelancaran dalam mengelola lahan tanah, karena sebagian besar warga Desa Cempaka berprofesi sebagai petani dimana Desa Cempaka mayoritas penduduknya bersawah dan bercocok tanam yang sangat memerlukan jaringan irigasi yang memadai agar hasil panen warga melimpah ruah. Sehingga, warga Desa Cempaka tidak mengalami kerugian yang sangat besar karena gagal panen yang dapat merugikan warga Desa Cempaka. Dalam pengaturan perundangan, pemerintah desa selalu disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala pemerintahan dan wakil-wakil rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah yang mandiri, dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa. Tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam pembangunan kawasan perdesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengakui dan menghormati

pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat. Dalam suatu pemerintahan desa, kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat, di pengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan terealisasi dengan baik.

Selain daripada itu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa yaitu toilet dan sumur-sumur di rumah warga. Ada beberapa dusun yang warganya masih belum mendapatkan toilet yang memadai dan air sumur yang mencukupi. Dari 7 dusun yang dibawahhi oleh Desa Cempaka Raja terdapat 1 dusun yang sangat memprihatinkan dalam hal tersebut yaitu Dusun Nyapah Jaya. Dimana warga dusun tersebut membuang hajat di semak-semak dan mengambil air sumur di rumah warga lainnya, yang sudah memiliki sumur sendiri.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan akan terentaskan. Pembangunan pedesaan

pada umumnya digunakan untuk mewujudkan tindakan yang diambil dan insiatif untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan no-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya: (1) terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; (2) terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); (3) belum tersusunya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; (4) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; dan (5) kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yan tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembanguna desa adalah sebagai berikut: (1) pembangunan ekonomi kerakyatan, (2) pengembangan sumber daya manusia yang handal, (3) pembangunan infrastruktur pedesaan, (4) strategis pencapaian pembangunan desa, (5) manajemen pembangunan desa.¹⁰

Tugas pokok pemerintah desa adalah menjalankan sebagian kewenangan kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kepada peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah

¹⁰Sarpin, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan desa Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 19, no.02 (juni 2014), h.34.

organisasi pemerintah dibawah kecamatan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien.

Dalam Islam orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan biasa disebut dengan khalifah. Menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah*, menjelaskan bahwa ada tujuh syarat yang harus dimiliki oleh orang yang berhak dicalonkan sebagai khalifah yakni adil, berilmu untuk ijtihad, sehat (panca indra lengkap), tidak cacat yang menghalangi dari bergerak dan cepat dalam bertindak, memiliki visi yang baik, berani dan menjaga rakyat, serta Quraisy¹¹. Menurut Al-Mawardi, apabila khalifah telah menunaikan hak-hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Dalam kepemimpinannya khalifah tidak mempunyai batas masa jabatan tertentu yang dibatasi dengan patokan waktu tertentu. Selama khalifah tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhalifahan maka ia tetap sah menjadi khalifah. Seperti pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ia memimpin sejak di baiat sampai meninggal dunia. Akan tetapi, jika pada masa kekhalifahan terjadi sesuatu yang mengakibatkan dipecat atau yang mengharuskan dirinya dipecat maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa

¹¹Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 336.

kekhalfahan tetapi dalam masa jabatannya khalifah dibatasi oleh pelaksanaan khalifah terhadap sesuatu yang menjadi dasar pembaitannya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.

Khalifah wajib mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta menerapkan hukum-hukumnya jika khalifah tidak lagi menjaga syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib untuk dipecat. Seorang khalifah dapat mundur dari jabatannya apabila yang pertama, keadilan yang ternoda yaitu karena faktor mengikuti syahwat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kedua, Syubhat adalah menyalahi kebenaran, syubhat menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi khalifah dan memutus kepemimpinannya. Cacatnya tubuh seorang khalifah juga dapat memutus kepemimpinannya seperti cacat pancaindra, cacat anggota tubuh, cacat perbuatan.¹²

Jabatan khalifah merupakan jabatan dunia bukan jabatan ukhrawi. Khalifah ada untuk menerapkan agama Islam terhadap manusia dan untuk menyebarkannya ditengah-tengah umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah seorang penguasa yang menerapkan syariat yang didatangkan kepadanya, beliau memangku jabatan kenabian dan kerasulan dan pada waktu yang sama juga memangku jabatan kepemimpinan atas kaum Muslim dalam melaksanakan hukum-hukum Islam kekuasaan khalifah tidaklah bersifat

¹²Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h.35-37.

mutlak, sebab kekuasaanya dibatasi oleh pemberi amanah yaitu Allah SWT.¹³

Al-Quran khususnya surah An-Nisa [4] : 58 menjelaskan tentang dasar-dasar pemerintahan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء ٥٨)

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.s. An-Nisa [4]: 58)¹⁴

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara?

¹³ Yahya AR, *Struktur Negara Khalifah Pemerintahan dan Administrasi* (Jakarta : Dar al-Ummah, 2006), h.83-85.

¹⁴ Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah, *Al-Quran Transliterasi Latin Terjemah Indonesia* (Jakarta:PT Suara Agung),h.164.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

- 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a) Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.¹⁵

- b) Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.10.

¹⁶ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h.126.

menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci daripada data sekunder. Jenis Penelitian ini termasuk studi lapangan (*field research*), maka data utama diperoleh dari responden yaitu Kepala Desa dan Masyarakat di Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini buku atau artikel serta pendapat para pakar yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁷ Maka untuk teknik mengumpulkan data diperlukan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi, yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.¹⁸ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.402.

¹⁸ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h.70.

b. Metode Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala desa dan jajarannya, masyarakat Cempaka Raja serta pihak-pihak yang dianggap tahu dalam penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹ Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

4. Sampel dan Tehnik Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian sampel dipilih dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* atau (sampel bertujuan). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁰ Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang berpengaruh dalam pemerintahan desa dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada Kepala Desa

¹⁹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.83.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), h.53-54

Cempaka Raja 1 (satu) orang, anggota petugas desa 9 (sembilan) orang, Tokoh Adat 1 (satu) orang, Tokoh Agama 1 (satu) orang, dan Anggota Masyarakat 4 (empat) orang.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit menuju kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Pengertian Tentang Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.²¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat di desa dalam Pembangunan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) menyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa

²¹ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016),h.162.

- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan kepala desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- 1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
- 2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- 3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan, kesehatan.
- 4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- 5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada . perangkat desa.

²²Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa, h. 15-16.

Patut disadari, bahwa di samping kewenangan dan hak yang dimiliki kepala desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.²³

Kewenangan, hak, kewajiban kepala desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan kabupaten kota, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 dalam melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala desa wajib menyampaikan

²³ *Ibid* , Pasal 26 Ayat (4)

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota.

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau walikota
- 2) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- 3) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.²⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 huruf B tentang Desa yang berkenaan dengan kewenangan lokal berskala desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kewenangan berskala Desa yaitu

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan pasar desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
9. Pengelolaan embung desa;
10. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
11. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.²⁵

3. Peran kepala desa dalam pembangunan

Melaksanakan tugas dibidang pembangunan merupakan salah satu tugas penting kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai perkembangan dan kemajuan di wilayah yang menjadi kekuasaannya pemerintahannya, serta melaksanakan pembangunan di desa, keberhasilan suatu pembangunan adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya insiatif pemerintahan desa.

²⁴ Zuhraini, *Op. Cit*, h. 136.

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2014

Pembangunan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa. Undang-Undang Desa sebagai ujung tombak pembangunan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 78 yaitu

- a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian pengarusutamaan dan keadilan sosial.

Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, pada Pasal 79 menjelaskan sebagai berikut diantaranya yaitu:

- a. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.
- b. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka, meliputi:
 - 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu enam tahun
 - 2) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu satu tahun.
- c. Rencana pembangunan jangka menengah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

- e. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintahan.
- f. program pemerintah atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- g. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.²⁶ sedangkan dalam Pasal 80 menjelaskan
 - a. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
 - b. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dari kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota.
 - d. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
 - 2) Pembangunan dari pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemajuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.²⁷ Selanjutnya pada Pasal 81 menjelaskan yaitu:
 - a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa
 - b. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong
 - c. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
 - d. Pembangunan lokal berskala desa dilakukan sendiri oleh desa.
 - e. Pelaksanaan program sektoral masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.²⁸ Dan dalam Pasal 82 menjelaskan yaitu:
 - a. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa

²⁶*Ibid*, Pasal 79

²⁷*Ibid*, Pasal 80

²⁸*Ibid*, Pasal 81

- b. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
- c. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali.²⁹

B. Pembangunan Desa dalam Fiqih Siyasah tentang Peran dan Tanggung

Jawab Pemimpin

1. Prinsip-prinsip siyasah tentang pemerintahan

Sistem pemerintahan dalam pandangan Al-Mawardi berdasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Konsep imamah (kepemimpinan) yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan imamah adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Menurutnya imamah, adalah jabatan politis keagamaan. Imam adalah pengganti (khalifah) Nabi Saw. Yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan dipihak lain sebagai pemimpin politik. Hukum untuk mendirikaninya adalah wajib menurut syara atas dasar ijmak umat. Pandangan ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, diantaranya, QS. An-Nisa/4:59

²⁹*Ibid*, Pasal 82

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء ٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan *ulilamri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”. (Q.S An-Nisa[4] 59)³⁰

Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok imamah, Al-Mawardi juga merujuk pada al-quran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah, yaitu majelis Syuro (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat). Sebagai realisasi telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah atas dasar pemufakatan (syuro) para pemuka Ansar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung di saqifah (bagsal) Bani Sa'idah di Madinah pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat (baiat)³¹.

Dijelaskan dalam fiqih siyasah terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain dari berpegang teguh dengan landasan hukum Islam al-quran dan Hadist) ialah sebagai berikut (a)

³⁰ Departemen Agama RI mushaf Al-quran dan terjemah, *Al-quran transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung), h.128

³¹Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*. *Jurnal Syari'ah dan hukum*, Vol 16 No.2 (Desember 2018), h.264-283

Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT, (b) Prinsip keadilan, (c) Prinsip persamaan (d) Prinsip musyawarah.³²

- a. Kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat- Nya wajib mengikuti Undang-Undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulilamri* diantara orang-orang yang beriman, selain *ulilamri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan pada qur'an Surat An- Nisa [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (Pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”. (Q.S An-Nisa [4]59)³³

Ulil Al-Amri oleh ahli Al-quran, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai

Functionaries, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep *Ulil Al-Amri* adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologidan Lintasan Sejarah PolitikIslam sejak MuhammadSAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet-2, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2008), h.123-126.

³³ Departemen Agama RI mushaf Al-quran dan terjemah, *Al-quran Transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung),h.128

diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.³⁴

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasanya semua rakyat memiliki persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa[4]:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
(النساء ٥٨)

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran padamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat”.(Q.s. An-Nisa [4]: 58)³⁵

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial yang bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan harapan subjek hukum.

³⁴ Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. “ *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*”. Vol 19 No.01 (Januari-Juni 2014), h.43

³⁵ Departemen Agama RI mushaf Al-quran dan terjemah, *Al-quran transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta:PT Suara Agung),h.128

Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentaraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itu manusia mengharapkan hal-hal di bawah ini:

1. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain
2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dengan alasan berbeda bulu
4. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya system keamanan lingkungan (siskamling)
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

c. Prinsip persamaan

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat[49]: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^{٣٦} وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

(الحجرات ١٠)

Artinya:” Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(Q.s.Al-Hujurat [49]: 10)³⁶

³⁶Departemen Agama RI mushaf Al-quran dan terjemah, *Al-quran Transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung),h. 846.

d. Prinsip musyawarah

Prinsip Musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa, masyarakat merupakan tolak ukur dari melaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Quran Ash-Shuraa [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (الشورى ٣٨)

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.s.Ash-Shuraa [42]: 38)³⁷

Dengan Musyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

Selain prinsip di atas ada beberapa prinsip pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia

³⁷ Departemen Agama RI mushaf Al-quran dan terjemah, *Al-quran transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT: Suara Agung),h. 789.

merupakan “*rule of Islamic law*”. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Perkataan amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat dipahami suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber dari Allah Swt rumusan kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baik sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus di pertanggungjawabkan kepada Allah. Dalam hal ini kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang.

2. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas dinyatakan dalam Al-quran antara lain surah Al-Isro [17]: 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُودِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الإسراء ٧٠)

Artinya: “ Dan sesungguhnya Kami telah memulyakan anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.s. Al-Isro [17]: 70)³⁸

Ayat tersebut dengan jelas mengekspresikan kemulyaan manusia.

Kemulyaan ini, mencakup kemulyaan pribadi, masyarakat maupun kemulyaan politik. Dalam Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya, karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal yaitu: (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; (3) kebebasan manusia.

Dalam persamaan manusia, Al-quran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain. Martabat manusia berkaitan erat dengan *karamah* atau kemulyaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Salah satu kemulyaan yang diberikan Allah kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalanya.

³⁸ Departemen Agama RI mushaf Al-quran dan terjemah, *Al-quran Transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung, h.435

kebebasan manusia dalam Islam, minimal ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, yaitu (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

3. Prinsip peradilan bebas

Dalam Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Di dalam Al-Quran surah An- Nisa [4] : 57

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ خُلُوفُ جَنَّتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا
(النساء ٥٧)

Artinya: “ Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman”. (Q.s. An-Nisa [4]:57)

Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi ia juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam Islam, hakim

memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas menentukan menetapkan putusannya. Bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

4. Prinsip perdamaian

Salah satu pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia dimuka bumi. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan juga mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Islam adalah agama perdamaian.

Al-quran dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah [2]: 208

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة ٢)

Artinya: “ kitab Al-quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 2)

5. prinsip kesejahteraan

prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil, akan tetapi mencakup kebutuhan spritual. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang tidak mampu. Al-quran telah menetapkan

sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

6. Prinsip ketaatan rakyat

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam Al-quran surah An-Nisa [4] :5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النساء ٥﴾

Artinya:“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.s. An-Nisa[4]:5)

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah tidak bersikap zalim. Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri dan dihentikan dari jabatannya.³⁹

2. Peran dan tanggung jawab pemimpin

³⁹ [https://scholar.google.co.id/citations, Zuhraini](https://scholar.google.co.id/citations?user=Zuhraini), “ kontribusi nomokrasi Islam (Rule of Islamic law) terhadap negara hukum pancasila”. *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol xII No. 1 (juni 2014), h. 175-180.

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya (Pemimpin Negara) itu diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, pemberian pejabat Imamah (Kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma (consensus ulama) kendati Al-Ahkam menyimpang dari mereka, Apakah kewajiban pengangkatan pemimpin negara itu berdasarkan akal atas syariat pengangkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat. Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Artinya:“ Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik Dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang di pimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab tugasnya. Bahkan seorang pembantu/ pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang di pimpinnya. Dan

kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (Hadist Riwayat Bukhari).⁴⁰

Penyebutan seperti ini memiliki konotasi “Pengamdian yang sangat tinggi” dari pejabat atau pemimpin terhadap rakyat atau pihak yang dipimpin. Oleh karenanya, sangat tepat bila dikatakan bahwa, dalam Islam, pemimpin/ pejabat berkedudukan sebagai *khadimul ummah* (pelayan umat) bukan sebagai *sayyidulummah* (tuan yang harus dilayani oleh umat).⁴¹ Kewajiban Imam menurut Al-Mawardi adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).

⁴⁰ Hadist riwayat Al-Bukhori

⁴¹ A. Malik Madaniy. *Politik Berpayung Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 10.

6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut *Fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁴²

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa menjadi Imam ataupun kepala negara tidak mudah. Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin harus memiliki sikap adil kepada semua warga, tanpa membedakan ras, suku, ataupun agama. Adil dalam segala hal, misalnya adil dalam pemberian beras raskin kepada orang-orang miskin. Dari sikap adil itu akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan antar warga khususnya persaudaraan antar muslim. Setiap warga berhak menerima suatu persamaan, bukan berarti

⁴² Prof. H.A. Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61-62.

orang kaya mendapatkan perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin diperlakukan sewenang-wenang.

Selain itu, pemimpin harus memiliki prinsip tolong menolong dan membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat yang lemah dan membela rakyat yang keadaan ekonomi lebih mampu, hal ini agar teriptanya perdamaian tanpa adanya peperangan antar umat manusia. Seorang pemimpin harus bisa menegakkan hak-hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milik pribadi dan hak mencari nafkah, serta hak mengeluarkan pendapat di muka umum. Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau menetapkan seorang pejabat dalam melaksanakan suatu urusan, pemimpin harus melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika orang tersebut dapat dipercaya baru bisa dapat diberi tanggungjawab untuk menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu urusan.

Konsep mengatur persyaratan kepemimpinan Negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah dan untuk melaksanakan tugasnya seorang pemimpin diharapkan memiliki sifat utama sebagai berikut:⁴³

1. Iklas karena Allah semata

Senantiasa mengharapkan akhirat dengan ikhlas karena Allah semata. Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat menghancurkan amal usahanya, seperti, gila kekuasaan, cenderung pangkat dan kesabaran

^{43 43} Syeh Mustafa Mansyur, *Fiqih Dakwah*, Cet 1 (Jakarta: Al I'tis 2000), h. 410-415

serta pengaruh atau terpedaya dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa yang lain yang dapat merusak kepemimpinannya.

2. Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, bijak berpengetahuan yang luas .

Berdaya ingat, kuat, cerdas, bijak, berpengetahuan luas dan berpandangan jauh dan tajam, berwawasan luas mampu menganalisis berbagai persoalan dari berbagai segi dengan cepat, tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta tidak gelap mata ketika menghadapi luap perasaan dan kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak mau akan menghadapi situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu perasaan. Karena itu ia harus menyelesaikan dengan menggunakan akal sehat dan yang bijak.

3. Berperangkai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan rarnah seorang pemimpin .

Hal ini penting, karena seorang pemimpin berhadapan dengan berbagai tipe manusia. Diantaranya mereka ada hal yang jahil dan bodoh, karena itu seorang pemimpin dengan sifat santunnya, berkewajiban melayani mereka dan menarik hatinya. Setidak- tidaknya mereka tidak dijadikan sebagai musuhnya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (آل عمران ١٥٩)

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkan mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. (Q.s. Ali Imran [3]: 159)⁴⁴

4. Bersahabat

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin lawan sifat ini adalah kasar dan angker. Banyak rasullulah yang menyinggung masalah ini. Antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah, ia meriwayatkan bahwa Rasullulah SAW bersabda yang Artinya: “Sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan mencintai sifat lemah lembut dan Dia memberikan sifat lemah lembut apa yang tidak diberikannya kepada orang yang bersifat kasar dan apa yang tidak diberikannya kepada orang yang lainnya.”⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, h 56

⁴⁵ Husein Bahrais, *Al-Jamius Shahih Bukhori Muslim* (Surabaya: Utama), h. 195

5. Berani dan sportif

Berani dan Sportif, tidak pengecut dan membabi buta. Sifat pengecut dan tidak membabi buta sangat membahayakan jamaah. Keberanian pada dasarnya, adalah ketetapan dan ketahanan hati, kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak takut mati yang disebabkan oleh gila dunia dan takut mati. Keberanian yang utama adalah berani mengatakan yang haq dan terus terang, pandai menyimpan rahasia, mau mengakui kesalahan, menyadari keadaan ketika marah. Maka sifat keberanian sangat penting bagi seorang pemimpin umat.

6. Siddiq

Siddiq, benar dalam berkata, sikap dan perbuatan, adalah sifat asasi yang harus dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini harus dijaga terutama bagi pemimpin. Sifat siddiq dalam kepemimpinan akan menebalkan kepercayaan orang banyak kepadanya. Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski hanya sedikit, akan menimbulkan keraguan, kepercaan, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin.

7. Tawadhu

Tawadhu, merendahkan diri dan tidak membanggakan diri kepada manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia terhimpun dan terikat kepada pemimpin. Sebaliknya, keangkuhan akan menjauhkan hati manusia darinya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam Al-quran Surat Ash-shuara[26]: 215

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ (الشورى ٢١٥)

Artinya: “Dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman”. (Q.s. Ash-Shuara [26]: 215)⁴⁶

8. Pemaaf

Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ikhsan sifat-sifat ini perlu dimiliki oleh pemimpin karena ia selalu berhadapan dengan sikap, persoalan dengan tipe manusia, kadang-kadang ia berhadapan dengan gangguan, perbuatan tidak senonoh atau persoalan-persoalan yang membangkitkan kemarahan yang datang dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan terhadap jama'ah selalu melalui pemimpin. Karena itu setiap pemimpin harus menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, menahan amarah, dan berbuat ikhsan.

9. menempati janji

Menempati janji dan sumpah setia, Akhlak seperti ini diperlukan oleh setiap muslim, terutama mereka yang bergerak dalam amal Islam. Sebuah lembaga institusi Akhlak ini dapat melahirkan kepercayaan dapat melahirkan kepercayaan dalam gerakan tolong menolong dan akan membuahkan hasil yang ingin dicapai. Allah SWT berfirman dalam qur'an surat Al-Fath [48]:

⁴⁶ Departemen Agama RI mushaf Al-quran terjemah, *Al-quran transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung), h.589

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ
فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ أَعْظِيمًا

(الفتح ١٠)

Artinya: “Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar”. (Q.s. Al-Fath [48]: 10)⁴⁷

10. Sabar

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebab kepemimpinan adalah semua amalan dari ummat, dimana terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit dan penuh berbagai persoalan yang berlawanan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi kesabaran, dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang yang mengemban amanah dari ummat. Firman Allah dalam Al-quran surah Al-baqarah [2]: 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقره ١٥٣)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.s Al-Baqarah [2]: 153)⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI mushaf Al-quran dan terjemah, *Al-quran transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung),h. 838

⁴⁸ Departemen Agama RI mushaf AL-quran dan terjemah, *Al-quran transliterasi latin terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung),h.38

11. Iffah dan Kiram

Iffah dan kiram adalah dua sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sifat ini melambangkan kesucian jiwa dan tidak mudah tunduk kepada hawa nafsu dan kecenderungan yang mengotori jiwa. Dengan sifat ini pemimpin tidak menjadi gila harta. Sebab ia menyadari, gila harta akan melemahkan tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin.

12. Wara' dan zuhud

Wara dan zuhud, sifat ini dapat menjauhkan seorang pemimpin dari hal-hal yang syubhat dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa karena takut terjebak dalam Kemurkaan Allah.

13. Adil dan jujur

Adil dan jujur, dan sifat ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Terutama kaitanya dengan kerja sama (*Amal jamai*), sebab dua sifat ini akan menjadi anggota menjadi tenang dan sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Dengan ini pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan kepercayaan ummat akan bertambah yakin kepada pemimpinnya

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Desa Cempaka merupakan salah satu dari sembilan desa yang ada di kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Desa ini pada awalnya merupakan susukan atau dikenal dengan umbulan Cempaka yang pada Tahun 1910 yang dipelopori oleh saudara H Seman bersama 30 orang temannya yang dari tiyuh Negara Tulang Bawang Marga Bunga Mayang, membuat lokasi setempat untuk perkebunan lada. Seiring dengan perjalanan Umbulan Cempaka secara adat (Bugawi) atau bahasa lampung di baton dengan upacara adat lampung Sungkai Marga Bunga Mayang sekaligus meresmikan nama kampung, kampung Cempaka Raja pada Tahun 1914 yang terdiri dari 4 (empat) faksi Adat yaitu (1) Faksi H. Mat Tayib, (2) Faksi H. Yusub Raden Setiawan, (3) Faksi H. Majid Glr. Sutan Penutup, (4) Faksi H. Dullah (Abdul Hakim). Kemudian Kampung Cempaka Raja oleh pemerintah Belanda pada saat itu ditetapkan sebagai pusat pemerintahan desa dengan kepala Kampung adalah: Sdr. H. Mat Tayib. Saat itu jumlah penduduk yang baru sebanyak 60 kk (kepala keluarga).⁴⁹

Dengan pesat laju pertumbuhan perekonomian penduduk Cempaka maka pemimpin pemerintah desa pun silih berganti. Pada Tahun 1925 s/d 1932 : Sdr. H Majid, Pada Tahun 1932 s/d 1942 yaitu Sdr Bumi Peturun, Sdr Burhan Glr

⁴⁹ Wawancara Abdullah, warga Desa Cempaka Raja kecamatan Sungkai Jaya, 11 oktober 2018.

Bintang Marga, Pada Tahun 1932 s/d 1964 yaitu Sdr Abdul Hakim Glr Ratu Nimbang Marga, Sdr H. Nawaw, Sdr Dris, Sdr H. Abdul Rasit, Sdr Sutan Makbul, Periode Tahun 1964 sampai 1981 Sdr Salim Glr Sutan Umpu Sutan, diketahui bahwa luas daerah Cempaka 2.800 H, Periode 1981 sampai dengan 2009 Sdr. H Djuhri Ratu Sampurna Jaya, Periode tahun 2010 sampai 2016 Sdr Rusli, ABA, Pada Tahun 2016-2017 pj kepala desa dipegang oleh Sdr Koriansyah, Pada Tahun 2017 sampai sekarang Kepala Desa dipegang oleh Hj. Riski Puspa Dewi, SE.MM.⁵⁰

B. Keadaan Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Letak Geografis Desa Cempaka Raja berada di wilayah sebelah barat Kabupaten Lampung Utara. Adapun batas wilayah Desa Cempaka Raja Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Ratu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kotabumi Udik, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cempaka Timur, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cempaka Barat. Jarak tempuh ke Ibu kota kecamatan sejauh 3 km dengan lama tempuh 15 menit. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Lampung Utara sejauh 50 km. Dengan lama tempuh sekitar 1 jam 15 menit.

2. Gambaran Umum Demografis.

Keseharian masyarakat Desa Cempaka Raja bercocok tanam, petani,

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Mahmud, warga Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya, 12 oktober 2018.

PNS, pedagang, buruh harian dan lainnya. Keadaan wilayah Desa Cempaka Raja masyarakatnya tergolong ke dalam kelompok usaha pertanian. Disepanjang jalan raya dan pendesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam padi dengan menggunakan cara yang baik, namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah pada saat panen raya. Desa Cempaka Raja merupakan salah satu dari 9 Desa yang terdapat di kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Desa ini memiliki luas wilayah 839 hektar. Desa Cempaka Raja mempunyai jumlah penduduk 2.115 jiwa yang tersebut dalam 7 wilayah Dusun yaitu Dusun Cempaka, Sugi Waras, Gudang Ulok, Pukem Mulia, Jaya Makmur, Nyapah Jaya, dan Dusun Negara Makmur.⁵¹

Tabel 1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

| No | Nama Dusun | Jumlah kk | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|--------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | Cempaka | 80 kk | 409 | 217 | 192 |
| 2 | Sugi Waras | 75 kk | 279 | 148 | 131 |
| 3 | Gudong Ulok | 90 kk | 440 | 276 | 164 |
| 4 | Pukem Mulia | 74 kk | 311 | 166 | 145 |
| 5 | Jaya Makmur | 90 kk | 317 | 174 | 143 |
| 6 | Nyapah Jaya | 29 kk | 99 | 46 | 53 |
| 7 | Negara Makmur | 80 kk | 260 | 164 | 96 |
| Jumlah | | 518 kk | 2.115 | 1191 | 924 |

Sumber data: Profil, 2018

⁵¹ Wawancara Hj. Riski Puspa Dewi, SE.MM, Kepala Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya, 8 oktober 2018.

Mata pencahariannya warga sangat beragam, terdiri dari PNS, petani, buruh harian sampai dengan pedagang. Namun pada umumnya warga tersebut bermata pencaharian sebagai petani, karena setengah dari luas wilayah Desa Cempaka Raja merupakan wilayah persawahan dan perkebunan.⁵² Keadaan penduduk Desa Cempaka Raja terbagi atas keadaan penduduk menurut jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian pokok, dan agama.⁵³

a. keadaan penduduk menurut Jenis kelamin

Penduduk Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2018 terdiri dari 518 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk 252,09 per KM. Terdiri dari laki-laki berjumlah 1096 dan perempuan 1019 yang keseluruhan jumlahnya 2115 orang.⁵⁴

b. Keadaan penduduk menurut Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, sudah memiliki beberapa sekolah diantaranya TK Bunda, SDN 1 Cempaka, SDN 2 Cempaka, SMPN 2 Sungkai Jaya dan SMK Harja. Yang bisa dijangkau dari desanya sendiri. Sehingga, warga Desa Cempaka Raja yang mempunyai anak-anaknya untuk menuntut ilmu sangat mudah karena lokasi yang ditempuh sangat dekat dari rumah warganya.

⁵² Wawancara dengan Bapak Das'at Kadus Dusun satu, Desa Cempaka Raja, Rabu 10 oktober 2018.

⁵³ Wawancara dengan bapak qoriansyah, seketaris Desa Cempaka Raja, 11 oktober 2018.

⁵⁴ Data diperoleh dari profil Desa Cempaka Raja tahun 2018.

Tabel 2

Keadaan penduduk menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|-------|----------------------|-----------|-----------|
| 1 | Belum masuk tk | 10 | 7 |
| 2 | TK | 8 | 7 |
| 3 | Tidak sekolah | 7 | 8 |
| 4 | SD | 25 | 15 |
| 5 | Tidak tamat sekolah | 5 | 7 |
| 6 | Tamat SD/ sederajat | 15 | 20 |
| 7 | Tamat SMP/sederajat | 30 | 16 |
| 8 | Tamat SMA/ sederajat | 20 | 18 |
| 9 | Tamat D-2/ sederajat | 4 | 2 |
| 10 | Tamat S-1/ sederajat | 20 | 12 |
| Total | | 136 | 105 |

Sumber: Profil Desa Cempaka Raja Tahun 2018

c. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara sebagian besar dibidang pertanian. Masyarakat Desa Cempaka Raja tergolong ke dalam kelompok usaha pertanian, baik warga yang mempunyai lahan tanah pribadi ataupun mereka hanya sebagai buruh tani yang bekerja pada tetangga yang mempunyai lahan tanah yang lumayan luas yang pekerjaannya membutuhkan tenaga orang lain. Selain bertani adapun berprofesi Pegawai Negeri Sipil, montir, Polri, pengusaha kecil, menengah dan besar, pedagang keliling, dukun tradisional, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan pengrajin industri rumah tangga lainnya. Adapun data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

| No | Jenis pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|--------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | Petani | 201 | 234 |
| 2 | Buruh tani | 65 | 35 |
| 3 | Pegawai negeri sipil | 9 | 11 |
| 4 | Montir | 6 | - |
| 5 | Polri | 1 | - |
| 6 | Pengusaha kecil, menengah dan besar | 1 | - |
| 7 | Pedagang keliling | 5 | 3 |
| 8 | Dukun tradisional | - | 1 |
| 9 | Karyawan perusahaan swasta | 1 | - |
| 10 | Pensiunan | 2 | 1 |
| 11 | Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 4 | 4 |
| Jumlah total nilai | | 295 | 289 |

Sumber: profil Desa Cempaka Raja Tahun 2018

d. Keadaan penduduk menurut sistem kepercayaan (Agama)

Penduduk yang ada di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara beragama Islam, yakni laki-laki terdiri dari 1094 orang, perempuan 1016 orang dan agama kristen laki-laki terdiri dari 2 orang dan perempuan 3 orang.

C. Pemerintahan Desa Cempaka

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanahkan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, dimana desa memiliki hak

asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, begitu juga di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat desa dalam setiap rencana yang diajukan kepala desa sebelum dijadikan keputusan desa.

Selain mempunyai tugas, badan permusyawaratan desa memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan permusyawaratan Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 6 (enam) orang anggota. Badan permusyawaratan desa tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang. Masa jabatan anggota BPD dapat di berhentikan secara paksa, dan pemberhentian tersebut bisa dilakukan apabila mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD.⁵⁵

Kepala desa merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan desa, karena kepala desa memiliki peran tersendiri. syarat untuk menjadi kepala desa diantaranya penduduk desa setempat dan sudah bertempat tinggal di desa tersebut

⁵⁵ Wawancara Bapak Agus, Ketua BPD Desa Cempaka Raja, Rabu 10 oktober 2018.

2 (dua) tahun berturut-turut, pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat, umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun, dan belum pernah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun sebagai kepala desa. Kepala desa juga dapat diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara tersebut bisa dilakukan apabila kepala desa di tuduh melanggar larangan yang telah diberlakukan. Namun ketika pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa kepala desa melakukan perbuatan yang dituduhkan, kepala desa dapat melakukan banding. Banding tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepala desa yang bersangkutan diberhentikan.⁵⁶

Selain kepala desa, pemerintahan desa juga diisi oleh sekretaris desa, kepala urusan kepala dusun, dan kepala seksi teknis lapangan. Sekretaris desa merupakan warga desa itu sendiri dan memiliki kriteria sendiri, di antaranya berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat, serta memahami kemampuan dibidang administrasi perkantoran. Sedangkan kepala urusan berpendidikan sederajat. Rendahnya berijazah SLTP atau sederajat dan berumur sekurang-kurangnya 20 tahun. Berbeda halnya dengan kepala seksi lapangan, kepala urusan, dan kepala dusun diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Dalam pemerintahan desa, bukan hanya aparat desa saja yang berperan untuk mengatur desa. desa juga harus memiliki APBD. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan rencana keuangan tahunan

⁵⁶ *Ibid*

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan desa dan harus mendapat persetujuan dari kepala desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendaharawan desa dan apabila di dalam laporan keuangan tersebut, terjadi penyimpangan, maka kepala desa yang harus mengganti seluruh kerugian.⁵⁷

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Pendapatan dan tunjangan tersebut dapat mengalami kenaikan paling tinggi 35 dari penghasilan terakhir setiap 4 (empat) tahun setelah mendapat pembangunan BPD.⁵⁸

Dari sekian banyak aparatur desa yang mempunyai tugas masing-masing, tentu saja aparat desa tersebut tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu menyejahterakan masyarakat.

D. Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

a. Kebijakan di bidang sosial

Semenjak kepemimpinan Hj. Riski Puspa Dewi, SE.MM, kepala desa tahun 2017 sampai dengan sekarang perkembangan desa yang sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Misalnya dalam hal gotong royong. Sebelum adanya kepemimpinan Kepala Desa dipegang oleh Hj. Riski Puspa Dewi, SE.

⁵⁷ Wawancara Noer Ali Al-Amin, Bendahara Desa Cempaka Raja, Desa Cempaka Raja , Rabu 10 oktober 2018.

⁵⁸ *Ibid*

MM dalam pemerintahan desa ini, masyarakat Cempaka Raja kurang memperdulikan kemajuan desa, melainkan hanya mementingkan diri masing-masing terutama dalam hal kebersihan desa.

Ketika pemerintahan desa dipimpin oleh ibu Hj. Riski Puspa Dewi, SE. MM mulai diberlakukan kembali terkait dengan gotong royong sesama warga yang rutin dilakukan pada hari minggu agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan bersih.⁵⁹

b. Kebijakan di bidang ekonomi

Pada tahun 2017 anggaran pendapatan dan belanja desa mencapai Rp 437.129.000

1. Pendapatan Desa Rp 437.129.000

Dana Desa Rp 437.129.000

2. Belanja Desa

a. Siring Pasang : 500 M Rp. 216.709.000

b. Gorong-gorong platbeton :1 Unit Rp. 9.274.000

c. Lapen : 700 M Rp. 211.146.000

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.437.129.000

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.437.129.000

⁵⁹ Wawancara Laudi , Warga Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya, 10 oktober 2018.

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0⁶⁰

c. Kebijakan di bidang agama

Pengajian antar ibu-ibu, pengajian antar ibu-ibu sangat rutin dijalankan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pengajian ini dilakukan bergantian di setiap rumah warga yang rutin mengikuti pengajian tersebut dilaksanakan di kantor desa apabila seluruh rumah warga yang mengikuti pengajian tersebut telah satu persatu didatangi dan pengajian terakhir dilakukan di kantor desa.⁶¹

d. Kebijakan di bidang infrastruktur

Ada beberapa hal yang masih harus ditangani oleh pihak pemerintahan desa, diantara dalam hal pembangunan jalan. Sebenarnya jalan aspal di Desa Cempaka Raja yang berbatasan dengan Desa Cempaka Timur Sampai dengan Cempaka Barat sudah pernah diperbaiki pada tahun 2014, tetapi rusak kembali. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh seringnya di lewati mobil-mobil besar pengangkut Singkong ataupun barang berat lainnya.⁶²

Selain daripada itu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa yaitu toilet dan sumur-sumur di rumah warga. Ada beberapa dusun yang warganya masih belum mendapatkan toilet yang memadai dan air sumur yang mencukupi. Dari 7 dusun yang dibawah oleh Desa Cempaka Raja terdapat 1

⁶⁰ Wawancara Heni Syafitri, Kaur Keuangan Desa Cempaka Raja, Kantor Desa Cempaka Raja, 8 oktober 2018.

⁶¹ Wawancara Maryamah Dusun 3, warga Desa Cempaka Raja, 12 Oktober 2018.

⁶² Wawancara Andi setiawan, Kaur Pembangunan Desa Cempaka Raja, Kantor Desa Cempaka Raja, 8 oktober 2018.

dusun yang sangat memprihatinkan dalam hal tersebut yaitu Dusun Nyapah Jaya. Dimana warga dusun tersebut membuang hajat di semak-semak dan mengambil air sumur di rumah warga lainnya, yang sudah memiliki sumur sendiri.⁶³

Dalam hal ini pemerintah desa belum mengambil tindakan untuk menindaklanjuti permasalahan disebabkan karena dana untuk pembangunan tersebut belum tercatat di APBD. Namun pada tahun depan akan mencoba merencanakan pembangunan toilet dan sumur bagi warga-warga dusun yang belum mempunyai toilet dan sumur sendiri.⁶⁴

Bukan hanya permasalahan di atas saja yang menjadi sorotan masyarakat luar, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa untuk menjadikan desa sesuai dengan yang diinginkan. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Saluran irigasi bagi petani juga sangat memprihatinkan dan belum memenuhi kebutuhan warga.
2. Pengaspalan jalan di desa masih sangat jauh harapan, jalan di desa masih sangat rusak dan terlihat lubang dimana-mana yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat.
3. Pembangunan jaringan air bersih atau air minum warga sekitar masih sering menggunakan air minum yang berasal dari sungai yang terdapat di

⁶³ Wawancara Pulung, Dusun Nyapah Jaya, Warga Desa Cempaka Raja, 10 oktober 2018.

⁶⁴ Wawancara Rita Diana, Kaur Perencanaan Desa Cempaka Raja, Kantor Desa Cempaka Raja, 9 oktober 2018.

desa sekitar, yang menyebabkan kesehatan warga sering terganggu akibat kurang bersihnya pasokan air minum.

e. Kebijakan di bidang kesehatan

Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu masyarakat Desa Cempaka Raja sebagian besar sudah menerima kartu BPJS dari pemerintah sekitar yang dapat digunakan untuk berobat tanpa harus mengeluarkan biaya. Anak-anak balita juga tidak lepas dari pantauan pemerintah sekitar, setiap beberapa bulan sekali sering diadakan posyandu di balai desa Cempaka Raja secara gratis.

f. Kebijakan di bidang budaya

Adanya pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar. Setiap sore pada hari minggu, ibu-ibu yang merupakan warga masyarakat Desa cempaka Raja rutin untuk melakukan senam aerobik yang dipimpin oleh ibu Hj. Riski Puspa Dewi, SE. MM yang merupakan kepala desa. Selain dari pada itu setiap bulannya ibu-ibu tersebut juga mendapatkan binaan dalam bentuk pembelajaran menjahit pakaian yang dibina oleh ibu fatimah yang merupakan salah satu warga masyarakat Desa Cempaka Raja

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun dan membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan.

Pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pengelolaan tambatan perahu, di Desa Cempaka belum ada karena dianggap belum terlalu diperlukan walaupun sebenarnya ada sungai di daerah tersebut, yang sangat diperlukan sebagian warga yang mempunyai lahan pertanian yang melewati sungai tersebut, warga yang memiliki perkebunan dengan berserbangan sungai mereka harus memutar dengan sangat jauh karena harus melewati jarak yang berbeda kecamatan karena disitulah yang terdapat jembatan yang bisa dilalui untuk sampai ke lokasi kebun. Ketika mereka ingin lebih cepat untuk sampai ke tujuannya mereka harus menyebrangi sungai dengan jalan kaki. Hal ini, sangat berbahaya apabila sewaktu-waktu terjadi banjir bandang, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Sedangkan dalam hal Pengelolaan pasar desa, di Desa Cempaka pasar ini diadakan seminggu sekali, yang biasanya diadakan pada hari jumat atau biasa di kenal oleh sekitar warga Cempaka biasanya disebut pasar jumat. Jadi pasar hari jumat itulah yang dijadikan masyarakat desa dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dimana pasar yang diadakan setiap hari jumat tersebut bukan hanya bermanfaat untuk warga Cempaka saja tetapi dari desa lain pun

sebagian mereka memanfaatkan pasar desa yang lokasinya ada di Desa Cempaka untuk memenuhi kebutuhannya seperti Desa Cempaka Timur, Cempaka Barat, Sriagung bahkan ada sebagian warga yang berbeda kecamatanpun berbelanja ke pasar jumat. Mereka memanfaatkan pasar jumat, walaupun lokasi pasar jumat tersebut luasnya tidak terlalu lebar tidak sebanding dengan warga yang memadati untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka rela mengantri di dalam pasar tersebut, yang sangat disayangkan apabila terjadinya hujan maka sangat memprihatinkan bagi warga untuk yang berada di lokasi pasar baik yang berjualan ataupun masyarakat yang hanya untuk berbelanja memenuhi kebutuhan, dan lokasi pasar yang masih tanah sehingga ketika habis hujan sangat susah untuk berjalan kaki karena lengketnya tanah.

Pada pengelolaan tempat pemandian umum, di Desa Cempaka belum ada karena dianggap belum dibutuhkan, karena sudah ada beberapa sebagian warga yang mempunyai sumur pribadi walaupun masih ada warga yang masih menumpang kepada tetangga sebelah yang tidak mempunyai sumur pribadi.

Adapun pada pengelolaan jaringan irigasi, di Desa Cempaka belum tersedianya jaringan irigasi, padahal sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Cempaka untuk kelancaran dalam mengelola lahan tanah, karena sebagian besar warga Desa Cempaka berprofesi sebagai petani dimana Desa Cempaka mayoritas penduduknya bersawah dan bercocok tanam yang sangat memerlukan jaringan irigasi yang memadai agar hasil panen warga

melimpah ruah. Sehingga, warga Desa Cempaka tidak mengalami kerugian yang sangat besar karena gagal panen yang dapat merugikan warga Desa Cempaka.

Lalu pada pengelolaan lingkungan masyarakat desa, pengelolaan ini belum terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat Desa Cempaka, karena pengelolaan tersebut tidak sepenuhnya menyeluruh setiap dusun-dusun yang ada di masyarakat desa karena ada Dusun Pukem Mulia yang pengelolaan desa tersebut kurang tersentuh sama aparat desa setempat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa.

Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu telah terlaksana di Desa Cempaka karena posyandu sering dilaksanakan sebulan sekali secara rutin. Selain itu, Desa Cempaka sudah memiliki satu puskesmas yang jaraknya tidak jauh dari kantor desa yang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Hal ini, sangat mempermudah warga Cempaka dalam berobat atau hanya sekedar mengecek kesehatannya.

Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, di Desa Cempaka salah satunya mengadakan senam aerobik yang dilaksanakan sebulan sekali. Akan tetapi, kegiatan ini belum secara rutin dilaksanakan karena kegiatan ini dilaksanakan hari jumat jam setengah empat sore, maka masih ada sebagian masyarakat yang melakukan aktifitas lain seperti masih berada di kebun atau dengan alasan capek mau istirahat. Padahal, apabila warga Cempaka dapat mengikuti senam aerobik tersebut dapat memberikan kebugaran jasmaninya.

Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, di Desa Cempaka belum adanya perpustakaan desa dan taman bacaan sehingga masih terbatasnya ilmu-ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh warga Desa Cempaka, melainkan hanya sebagian dari mereka yang mencari ilmu-ilmu pengetahuan sendiri baik dari media massa maupun informasi-informasi dari orang lain. Taman bacaan hanya tersedia di sekolah-sekolah yang waktunya dibatasi waktu jam sekolah. Sehingga, yang tidak sekolah atau sudah berhenti sekolah maka sangat jarang untuk membaca buku-buku karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Adapun mereka yang ingin mencari ilmu-ilmu pengetahuan harus mencari sendiri baik dengan membeli buku, yang mana jarak untuk membeli buku sangat jauh jaraknya. Mereka harus pergi ke kota yang jarak dari Desa Cempaka ke kota yang terdapat jualan buku sekitar satu jam setengah dengan menempuh dengan kendaraan sepeda motor.

Dengan demikian berbeda pada pengelolaan embung desa, di Desa Cempaka sudah adanya embung desa dimana yang letaknya tidak jauh dari kantor balai desa, tempatnya berada di belakang kantor desa. Akan tetapi, tidak adanya tindak lanjut yang lebih dalam pengelolaan dan belum terawatnya sedemikian rupa karena embung Desa Cempaka sangat kotor lokasinya dan di pinggir-pinggirnya banyak rumput-rumput yang seharusnya tidak ada. Sehingga, apabila embung desa itu terawat pasti akan terlihat embung desa yang bersih dan indah dipandang.

Pengelolaan air minum berskala desa, Desa Cempaka menggunakan air minum mereka memasak sendiri dari air sumur masing-masing. Yang cara memasaknya pun masih ada yang menggunakan secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar, dengan alasan memanfaatkan kayu bakar yang berada di kebun, dan lebih menghemat biaya, sehingga uang yang seharusnya dibelikan kompor dan gas bisa digunakan jauh yang lebih bermanfaat. Akan tetapi, ada sebagian warga Desa Cempaka memakai kompor gas dengan alasan lebih mempermudah dalam memasak. Sehingga, tidak perlu mengambil kayu bakar.

Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, di Desa Cempaka masih relatif sangat minim, karena warga masyarakat untuk melewati ke perkebunan masih ada sebagian jalan yang sangat kecil, yang hanya bisa dilalui penjalan kaki dan bisa dilewati dengan kendaraan sepeda motor saja, dimana sangat memprihatinkan ketika sudah terjadi musim hujan pasti jalannya licin karena jalannya masih tanah. Sehingga, sangat menghambat warga Desa Cempaka untuk melakukan aktivitasnya bekerja di lahan perkebunannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Semenjak kepala desa dipimpin oleh ibu Hj. Riski Puspa Dewi, SE. MM, sedikit demi sedikit tumbuh kembali semangat gotong royong antar warga negara yang biasanya dilakukan pada hari minggu untuk membersihkan lingkungan sekitar, pengajian antar ibu-ibu pun biasanya dilakukan secara rutin sebulan sekali yang secara bergantian dari rumah satu ke rumah lainnya saling bergantian dan setelah selesai

sekalinya dilakukan pengajian di Mesjid Nurul Iman yang bersampingan dengan kantor Desa Cempaka, dengan kegiatan ini antara warga Desa Cempaka bisa saling bersilaturahmi sesama umat muslim khususnya Desa Cempaka. selanjutnya di bidang kesehatan yakni posyandu sering dilaksanakan sebulan sekali dan dilaksanakan secara gratis karena adanya program BPJS yang bisa membantu masyarakat setempat untuk bisa menjaga kesehatan dan sangat membantu warga dalam memeriksa kesehatan anak-anak balita sampai dewasa untuk memeriksa kesehatannya. Selain itu, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan di Desa Cempaka mengadakan senam aerobik yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bidang-bidang yang belum sepenuhnya tersentuh adalah infrastruktur yang meliputi perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa, pembangunan jembatan, pembangunan air bersih, pembangunan sumur bor, pembangunan jamban keluarga, pembangunan pasar desa, pembangunan perpustakaan desa, serta pembangunan tugu batas desa.

Terhambatnya Pelaksanaan Pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkenaan dengan kewenangan lokal berskala desa dan PP No. 43 Tahun 2014 diakibatkan karena kurangnya dana.

B. Pandangan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri. Dengan undang-undang itu desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Semua yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangatlah sejalan dengan syariat Islam yakni mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat seperti yang tertuang di dalam al-quran surat An-Nisa [4]: 58. Yang artinya “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran padamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat”. (Q.s. An-Nisa [4]: 58).

Dalam hal ini jelas bahwasanya prinsip dalam pemerintahan salah satunya kekuasaan sebagai amanah, dan berlaku adil yaitu kekuasaan harus dijalankan dengan amanah dalam konteks ini memberikan apa yang menjadi hak rakyatnya dalam menjalankan pembangunan yang merata kepada seluruh warga Cempaka

baik dalam bidang infrastruktur, sosial, agama, budaya, kesehatan dan ekonomi. Sehingga, akan terciptanya kesejahteraan kepada warganya.

Akan tetapi, di Desa Cempaka sebagian warganya belum sepenuhnya merasakan pembangunan yang secara merata karena mereka masih beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan desa lebih mendahulukan yang lokasinya dekat dengan kantor Desa Cempaka, bahkan mendirikan pembangunan yang lokasinya dekat dengan desa, ini semua bisa terlihat pasar jumat terletak depan kantor desa yang jaraknya sangat dekat dengan kantor desa, puskesmas berada di belakang desa yang bahkan bisa dijangkau dengan jalan kaki, embung desa yang lokasinya dekat dengan kantor desa.

Sehingga, yang jaraknya cukup jauh dari kantor desa belum adanya pembangunan. Hal ini, menunjukkan bahwa pembangunan desa yang tidak merata akan menimbulkan ketidakadilan kepada warga Desa Cempaka sehingga terjadinya warga desa yang berburuk sangka kepada kepala desa atau aparat yang berwenang dalam pembangunan desa. Akibatnya menimbulkan tidak percaya sepenuhnya warga Desa cempaka kepada kepala desa dan aparat yang berwenang. Hal ini, dapat menimbulkan kecurigaan yang besar kepada kepala desa atau aparat yang berwenang dalam hal pembangunan desa.

Dengan demikian, untuk laju pesatnya kemajuan kesejahteraan warga Desa Cempaka belum pada kesejahteraan yang seutuhnya. seharusnya pembangunan yang dilaksanakan dapat dijalankan dengan adil dan secara merata kepada warga Desa Cempaka agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara

sesama dusun Desa Cempaka. Pada hakikatnya kepala desa harus melaksanakan pembangunan desa secara merata kepada warga yang tidak hanya dilaksanakan pembangunan desa yang lokasinya dekat dengan kantor desa.

Agar warga Cempaka bisa merasakan pembangunan desa yang secara merata, maka diharuskan terpenuhi semua kebutuhan dan sarana yang lengkap, baik dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan aspal yang menghubungkan ke pusat penjualan hasil panen maupun dari kebun atau sawah. Karena apabila jalan menuju ke perjalanan pusatpun baik maka akan memudahkan masyarakat dalam menjual hasil panennya. sehingga akan menimbulkan kesejahteraan kepada warga Desa Cempaka. sebaliknya, walaupun hasil panennya melimpah ruah, namun sarana jalannya tidak mendukung, maka akan sulit membawa hasil panen untuk dijual ke tempat penerimaan barang tersebut. Akibatnya, pengeluaran yang dikeluarkan warga semakin besar karena uangnya habis dengan mengupah para pekerja.

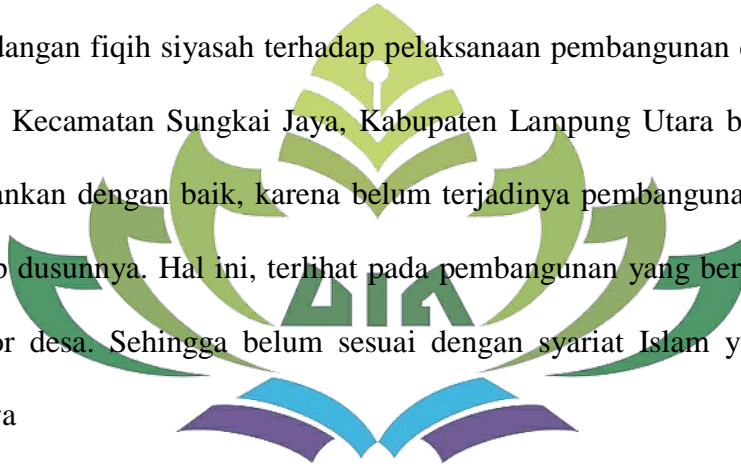
Dilihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Cempaka belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan dalam fiqh siyasah yang salah satunya prinsip keadilan dan prinsip kesejahteraan. Karena Allah swt memerintahkan setiap pemimpin harus bersikap amanah yaitu menjalankan kewajiban sebagai seorang pemimpin harus sesuai yang telah di syariatkan dalam Islam yaitu salah satunya sudah jelas yang tertera pada ayat Al-quran di atas yaitu amanah, adil, akan menjadikan warga Desa Cempaka menjadi sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya terlaksana pada pemerintahan Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Hal ini disebabkan karena anggaran pembangunan desa yang terbatas.
2. Pandangan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, karena belum terjadinya pembangunan yang merata di setiap dusunnya. Hal ini, terlihat pada pembangunan yang berada dekat dengan kantor desa. Sehingga belum sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa



B. Saran

1. Ditujukan kepada pemerintah desa, sebaiknya aparat desa lebih memperhatikan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, agar terciptanya desa yang maju dan sejahtera.
2. Ditujukan kepala desa supaya pembangunan tidak hanya dekat dengan kantor desa, supaya masyarakat merasakan pembangunan yang merata
3. Ditujukan kepada masyarakat, sebaiknya masyarakat desa lebih ikut berpartisipasi dalam membangun desa yang maju dan sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah, *Al-Quran Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT Suara Agung, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Hamidy, Zainuddin Dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari I-IV* Jakarta: Widjaya, 1992.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Husein Bahrais, *Al-Jamius Shahih Bukhori Muslim*, Surabaya: Utama.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qisti Press, 2014.
- Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia, Syari'ah dan hukum*, Vol 16 No.2 Desember 2018.
- Sarpin, *Peran kepala desa dalam pembangunan desa, Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 19 No.02 Juni 2014.
- Soeratno, Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke 14*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Alfabeta, 2014.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Syeh Mustafa Mansyur, *Fiqih Dakwah*, Cet 1 Jakarta: Al I'tis 2000.

Tim visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Yahya AR, *Struktur Negara Khalifah Pemerintahan dan Administrasi*, Jakarta: Dar al-Ummah, 2006.

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

<https://scholar.google.co.id/citations>, Zuhraini, *kontribusi nomokrasi Islam Rule of Islamic law terhadap negara hukum pancasila*. *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol xII No. 1 juni 2014.

Zuhri, Muhammad Harfin, *Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam*, *Akademik: Jurnal pemikiran islam*, Vol 19, No.01 juni 2014.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Lampiran 2 Panduan Wawancara
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
4. Lampiran 4 Permohonan Izin Riset
5. Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintahan Provinsi Lampung
6. Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara
7. Lampiran 7 Surat Keterangan Izin Riset
8. Lampiran 8 Blanko Konsultasi Skripsi



Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Wawancara Kepada Kepala Desa
 - 1. Sejak kapan ibu menjabat menjadi Kepala Desa Cempaka raja?
 - 2. Apa saja tugas ibu sebagai Kepala Desa Cempaka Raja?
 - 3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa?
 - 4. Desa Cempaka Raja itu berbatasan dengan desa apa saja?
 - 5. Ada berapa desa di kecamatan Sungkai Jaya?
 - 6. Ada berapa jiwa dalam setiap dusun?
- B. Wawancara Kepada Perangkat Desa
 - 1. Apa saja program-program yang sudah dan belum dilaksanakan di Desa Cempaka Raja?
 - 2. Siapa saja yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Cempaka Raja?
 - 3. Adakah anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2017?
- C. Wawancara Kepada Masyarakat
 - 1. Bagaimana sejarah Desa Cempaka Raja?
 - 2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan?
 - 3. Apakah harapan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap pembangunan di Desa Cempaka Raja?
 - 4. Apakah kepala desa dalam menjalankan praktik dan kebijakan pemerintahan desa secara transparansi kepada masyarakat?
 - 5. Kapan pelantikan kepala desa yang sekarang menjabat sebagai kepala desa?
 - 6. Apakah mata pencaharian warga Desa Cempaka?
 - 7. Adakah kegiatan rutin yang dilakukan warga seperti gotong royong untuk kebersihan dan dilakukan pada hari apa?
 - 8. Kegiatan apa yang dilakukan di bidang keagamaan?
 - 9. Apakah setiap warga sudah mempunyai toilet semua dan sumur air yang mencukupi?

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden: Kepala desa

Identitas responden

Nama :H.j Riski Puspa Dewi SE.MM

Usia :46

Pekerjaan :Kepala desa

Daftar pertanyaan:

1. Sejak kapan ibu menjabat menjadi kepala Desa Cempaka Raja?
2. Apa saja tugas ibu sebagai kepala Desa Cempaka Raja dalam melaksanakan pembangunan?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa?
4. Desa Cempaka Raja itu berbatasan dengan desa apa saja?
5. Ada berapa desa di kecamatan Sungkai Jaya?
6. Ada berapa jiwa dalam setiap dusun?

Jawaban:

1. Saya, menjabat menjadi Kepala Desa Cempaka Raja sejak Tahun 2017 sampai sekarang, yang menggantikan bapak Rusli, ABA. Untuk mengemban jabatan menjadi Kepala Desa Cempaka Raja.
2. Tugas ibu yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai yang telah diatur dalam undang-undang desa.
3. Kurangnya dana
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cempaka Timur, Kecamatan Sungkai Jaya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Abung, Kecamatan Kotabumi dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cempaka Barat.
5. Sembilan desa yaitu Desa Cempaka, Cempaka Timur, Cempaka Barat, Sri Agung, Sri Jaya, Suka Jaya, Lelang Tengah, Cahya Makmur dan Desa Negara Agung.
6. Dusun Cempaka 409 jiwa, Sugi Waras 279 jiwa, Gudong Ulok 440 jiwa, Pukem Mulia 311, Jaya Makmur 317 jiwa, Nyapah Jaya 99 jiwa, Negara Makmur 260 jiwa.

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden: Perangkat desa

Identitas responden

Nama :Qoriansyah SE

Usia :48

Pekerjaan :sekretaris

Daftar pertanyaan:

1. Apa saja program-program yang sudah dilaksanakan di Desa Cempaka Raja?
2. Siapa saja yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa?
3. Adakah anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2017?

Jawaban:

1. Yang sudah terlaksana pada tahun 2017 yaitu siring ukuran 500 m, gorong-gorong platbeton satu unit, dan lapen 700 m.
2. Desa Cempaka Raja sampai sekarang telah dipimpin oleh 12 Kepala Desa yaitu bapak H. Majid, Bumi Peturun, Burhan, Abdul Hakim, H. Nawaw, Dris, H. Abdul Rasit, Sutan Makbul, Salim, H. Djuhri Ratu Sampurna Jaya, Rusli, dan Ibu Hj. Riski Puspa Dewi, SE.MM.
3. Pada tahun 2017 anggaran pendapatan dan belanja desa mencapai Rp 437.129.000

1. Pendapatan Desa Rp 437.129.000

Dana Desa Rp 437.129.000

2. Belanja Desa

- a. Siring Pasang : 500 M Rp. 216.709.000
- b. Gorong-gorong platbeton :1 Unit Rp. 9.274.000
- c. Lapen : 700 M Rp. 211.146.000

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.437.129.000
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.437.129.000

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden: Tokoh Adat

Identitas responden

Nama : Abdullah

Usia :67

Pekerjaan :petani

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah Desa Cempaka Raja?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan?

Jawaban:

1. Desa Cempaka Raja merupakan salah satu dari sembilan Desa yang ada di kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Desa ini pada awalnya merupakan susukan atau dikenal oleh Sdr. H Seman bersama 30 orang temannya dari tiyuh Negara Tulang Bawang Marga Bunga Mayang, membuat tempat perkebunan lada. Seiring dengan perjalanan umbulan Cempaka telah diresmikan secara adat (Bugawi) atau bahasa Lampung di Baton dengan upacara Adat lampung Sungkai Marga Bunga Mayang sekaligus meresmikan nama kampung Cempaka Raja pada Tahun 1914.
2. Peran Kepala Desa Cempaka Raja dalam melaksanakan pembangunan kurang mengawasi kegiatan pembangunan di lapangan.

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Tokoh Agama

Identitas responden

Nama : Maryamah

Usia : 55

Pekerjaan : petani

Daftar pertanyaan:

1. Apakah harapan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap pembangunan di Desa Cempaka Raja?
2. Kegiatan apa yang dilakukan di bidang keagamaan?

Jawaban:

1. Saya sebagai masyarakat berharap agar pemerintah desa meningkatkan lagi pembangunan di bidang pendidikan khususnya membangun gedung TPA.
2. Pengajian ibu-ibu, pengajian ini sangat rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali.



Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Masyarakat

Identitas responden

Nama : Mahmud

Usia :35

Pekerjaan :petani

Daftar pertanyaan:

1. Kapan pelantikan kepala desa yang sekarang menjabat sebagai kepala desa?
2. Apakah setiap warga sudah mempunyai toilet semua dan sumur air yang mencukupi?
3. Apakah kepala desa dalam menjalankan praktik dan kebijakan pemerintahan desa secara transparansi kepada masyarakat?

Jawaban:

1. Tahun 2017
2. Belum, masih ada warga yang tdk mempunyai sumur dan toilet sendiri
3. Kurang terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang ikut serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa.

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Masyarakat

Identitas responden

Nama : Das'at

Usia :42

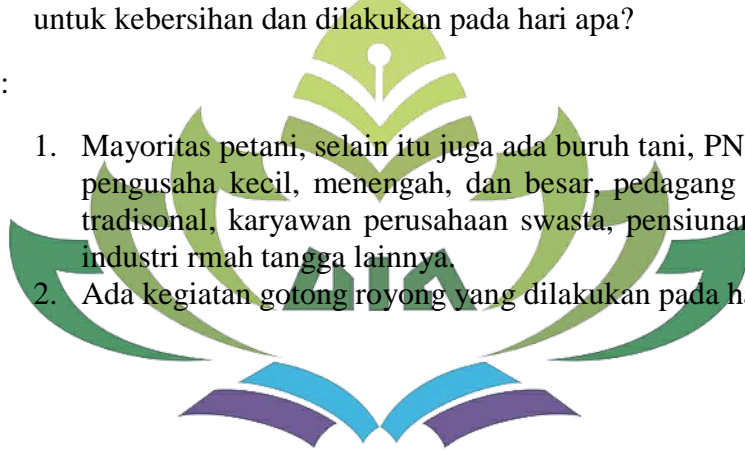
Pekerjaan : Kadus dusun satu, Desa Cempaka Raja

Daftar pertanyaan:

1. Apakah mata pencaharian warga Desa Cempaka?
2. Adakah kegiatan rutin yang dilakukan warga seperti gotong royong untuk kebersihan dan dilakukan pada hari apa?

Jawaban:

1. Mayoritas petani, selain itu juga ada buruh tani, PNS, montir, polri, pengusaha kecil, menengah, dan besar, pedagang keliling, dukun tradisonal, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan pengrajin industri rmah tangga lainnya.
2. Ada kegiatan gotong royong yang dilakukan pada hari minggu



Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Hj. Riski Puspa Dewi, SE.MM

Kedudukan :Kepala desa

Umur :47

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Junaiti

Npm : 1521020278

Fakultas: Syariah

Jurusan: Siyasa

Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cempaka Raja 2018

Responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qoriansyah SE

Kedudukan : sekretaris

Umur :48

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Junaiti

Npm : 1521020278

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan: Siyasah

Semester : VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Cempaka Raja kecamatan sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cempaka Raja,

2018

responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah
Kedudukan : Tokoh Adat
Umur : 67

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Junaiti
Npm : 1521020278
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasah
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cempaka Raja, 2018

Responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryamah
Kedudukan : 60
Umur : Tokoh Agama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Junaiti
Npm : 1521020278
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasah
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cempaka Raja 2018

Responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmud
Kedudukan : 56
Umur : Tokoh Agama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Junaiti
Npm : 1521020278
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasah
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cempaka Raja 2018

responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Das'at
Kedudukan : Kadus satu Desa Cempaka Raja
Umur : 55

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Junaiti
Npm : 1521020278
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasa
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cempaka Raja 2018

responden